

BAB IV

TRAH KIAI DAN PENGARUHNYA DALAM KONTESTASI POLITIK PEMILUKADA DI KABUPATEN BANGKALAN PERIODE 2003-2013

A. Sejarah Trah Kiai di Bangkalan

Bangkalan memang merupakan kabupaten yang masyarakatnya masih sangat menjunjung tinggi patriotisme terhadap kiai, baik di sektor ekonomi, budaya bahkan dalam bidang politik. Seperti diketahui, kiai yang paling dikenal dalam bidang politik adalah RKH. Fuad Amin Imron (RA Fuad). RA Fuad adalah cicit Mbah Kholil, kiai besar yang pernah dimiliki Madura. Mbah Kholil atau Syaikhona Kholil adalah guru para pendiri Nahdlatul Ulama (NU), seperti KH Muhammad Hasyim Asy'ari, KH Abdul Wahab Hasbullah, RKH. As'ad Syamsul Arifin, KH Bisri Syansuri dan lainnya.

Syaikhona Kholil menjadi rujukan dalam masalah agama, sosial dan politik dimasanya, yang sangat fenomenal adalah lahirnya NU tidak lepas dari peran Syaikhona Kholil waktu itu (peran kunci), oleh sebab itu Syaikhona Kholil mempunyai putra-putri yang terus berkembang pada cucu-cicitnya, yang sampai saat ini masih meneruskan tradisi pesantren di Kabupaten Bangkalan.¹

Nenek buyut RA Fuad adalah Raden Ayu Arri'ah, yang juga merupakan keturunan keluarga bangsawan di Bangkalan. Sementara itu, ayah RA Fuad, KH.

¹ Imam Bukhori, *Wawancara*, Bangkalan 15 Desember 2015.

Amin Imron adalah sosok kiai, sekaligus politikus. Ayahnya merupakan salah satu tokoh sentral PPP, tidak hanya di daerah Bangkalan, tapi tingkat nasional.

Trah politik RA Fuad terasa sejak pasca reformasi, tepatnya ketika dia menduduki kursi anggota DPR RI periode 1999–2004. Maklum, kala itu Ra Fuad adalah keturunan langsung Bani Kholil, keluarga besar ulama' legendaris Madura. Ra Fuad adalah anak Kiai Amin Imron, cucu Syaikhona Kholil. Status itulah yang membuat nama Ra Fuad begitu dihormati oleh warga Bangkalan.

Dari situ pula, dinasti politik trah kiai juga begitu terasa di setiap periode pemilu. Contohnya, ketika Ra Fuad tercatat sebagai pengurus PKB (waktu itu menjabat wakil ketua DPW PKB Jatim), partai tersebut juga selalu menjadi pemenang. Seperti pada Pemilu 1999 dan 2004, PKB mendapat 24 kursi. Sedangkan, pada Pemilu 2009, PKB Bangkalan yang diketuai Fuad juga menjadi pemenang meski hanya mendapat sepuluh kursi. Konflik besar-besaran di PKB kala itu akhirnya membuat Fuad memilih hengkang dan berlabuh di Partai Gerindra.

Modal politik itu juga yang membuat dia begitu mulus saat maju sebagai kandidat bupati Bangkalan pada pilkadfa 2003. Sempat terlibat perebutan tiket pencalonan bupati dengan Kiai Imam Bukhori, (keponakannya sendiri) akhirnya

Ra Fuad melenggang sebagai kandidat yang diusung PKB. Hasilnya, dia menang mutlak.

Demikian juga saat pilkada di Kabupaten Bangkalan 2008. Tanpa ada tantangan, beliau terpilih kembali sebagai bupati untuk yang kedua kalinya. Tidak cukup sampai di situ, setelah tidak bisa mencalonkan bupati, Ra Fuad berusaha melanjutkan kepemimpinannya. Awalnya, dia berencana mencalonkan sang istri, Nyai Siti Masnuri Fuad Amin. Namun, akhirnya yang maju adalah sang putranya, Makmun Ibnu Fuad yang akrab dipanggil Ra Momon. Hasilnya, sang putra mahkota yang maju berpasangan dengan Ra Mondir Rofi'i dan berhasil mengalahkan pesaingnya yakni Nizar Zahro dan Zulkifli.

Hasil pilkada di Kabupaten Bangkalan juga menelurkan rekor. Pertama adalah perolehan suara Ra Momon sebanyak 90 persen serta tercatat sebagai bupati paling muda. Dia dilantik pada usia 26 tahun. Setelah RA Momon duduk dikursi bupati, RA Fuad (ayah dari Ra Momon) maju dalam pemilihan calon legislatif DPRD Bangkalan melalui partai Gerindra, dalam pemilihan calon legislatif tersebut Ra Fuad pun kembali menjadi pemenang pemilu dan duduk sebagai ketua DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2014-2019.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa di dalam jajaran Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Bangkalan berada di bawah pengaruh kekuasaan RKH. Fuad Amin

Imron yang mengakui memiliki keturunan darah Syaikhona Kholil. Sang anak sebagai bupati dan sang ayah sebagai ketua Legislatif di Kabupaten Bangkalan. Dalam proses kepemimpinan Ra Momon sebagai bupati tidak ada perubahan yang signifikan di dalam pemerintahannya. Sebab, banyak yang menyebut sang putra mahkota hanya sebagai simbol.

Sebenarnya kepemimpinan Ra Momon sebagai bupati selama ini masih ada di dalam bayang-bayang Ra Fuad selaku ayahnya sendiri. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang di ambil masih melalui konsultasi ayahnya, dengan demikian bisa dikatakan bahwa bupati masih ada di tangan Ra Fuad, hanya saja secara struktural Ra Momon menjadi bupati di Kabupaten Bangkalan.²

Lantas Ra Fuad membangun dinasti kekuasaan hingga bisa sedemikian rupa, selain trah Bani Kholil yang membuatnya begitu disegani, kemampuan Ra Fuad menggunakan jaringan-jaringan penting di Kabupaten Bangkalan yang menjadi faktor utama. Ada tiga jaringan yang benar-benar dikuasai olehnya di Kabupaten Bangkalan. Yakni, jaringan *klebun*, kaum *blater* dan para santri.

B. Pengaruh Trah Kiai Dalam Kontestasi Politik Di Kabupaten Bangkalan

² Syukur, *Wawancara*, Bangkalan, 18 Desember 2015.

Sampai saat ini kiai masih mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan social-politik di Kabupaten Bangkalan. Hal ini dapat dijumpai di beberapa tempat yang kental dengan budaya Jawa dan tradisi masyarakat pesantren.

Di beberapa daerah lain, kiai tidak memiliki peran langsung dalam politik namun pengaruhnya sangat kuat dalam kehidupan berpolitik, khususnya di kalangan masyarakat agamis (Islam). Kiai berperan secara tidak langsung, kita dapat melihatnya disaat kader-kader politik berusaha mendapatkan pengaruh di masyarakat. Beragam bentuk pendekatan dilakukan politikus demi memperoleh dukungan seorang kiai.

Namun hal itu tidak terjadi di Bangkalan, kiai bahkan turun langsung dalam percaturan politik. Sudah menjadi jargon, yang menyatakan bahwa masyarakat ikut apa kata kiai di Kabupaten Bangkalan bahkan sampai urusan politik apa kata kiai, itulah yang menjadi jargon. Budaya ini belum tergerus oleh perkembangan zaman walaupun pergeseran-pergeseran nilai terus terjadi setiap masa. Kharisma kiai merupakan senjata paling mujarab untuk mendapatkan pengaruh di masyarakat, dan masyarakatpun secara sadar menerima.

Di Kabupaten Bangkalan kiai yang dianggap berpengaruh adalah kiai yang mempunyai garis keturunan atau trah. Trah yang memang tersambung

silsilahnya kepada mbah Kholil, ulama besar yang ada di Kabupaten Bangkalan. Politik yang membawa nama besar seorang kiai sudah menjadi budaya yang begitu kental. Meski sudah ada batasan bahwa kiai hanya bertugas mengurus umat dan tidak mau terlibat kedalam politik praktis. Keberadaan kharismanya masih dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Setelah menjadi pemimpin, budaya sungkem atau rasa patriotisme seorang santri terhadap kiai tidak pernah ditinggalkan, hal ini rupanya untuk “melanggengkan” kekuasaan. Agar dukungan dari kiai tidak lepas, maka beberapa upayaupun dilakukan. Bahkan lawan politik tidak jarang yang mempengaruhi kiai untuk mengalihkan dukungannya. Untuk melanggengkan kekuasaan, maka seorang pemimpin berusaha meminta nasihat yang akan dijalankan di dalam kebijakan politiknya.

Pengaruh politik trah kiai di Bangkalan memang tak lepas dari sifat ketakdziman seorang santri pada kainya. Peran santri dalam menyebarkan berita di sekitar pesantren kepada masyarakat memiliki peran penting. Banyak politikus menyekolahkan anaknya di pesantren demi mendapatkan simpati dan pengaruh di lingkungan pesantren yang bersangkutan. Jauh hari sebelum terjun ke dunia politik orang mempunyai pandangan strategis dari kebijakan lokal. Menempatkan anak ke dalam pesantren bertujuan di samping itu juga untuk memperluas

pengaruh. Fenomena seperti itu banyak dipraktikkan dan ternyata sudah lama menjadi budaya yang tersembunyi yang masih kurang mendapat kritikan.

Masyarakat yang terpengaruh kepada kiai dimulai saat dalam pesantren kiai mendidik anak-anak para wali santri baik dari Bangkalan maupun dari luar Bangkalan, hal itu sampai sekarang masih terus berlangsung. Oleh karena itu, peran kiai kholil dimasa itu di teruskan oleh keturunan yang ada sekarang, dimana patron masyarakat Kabupaten Bangkalan masih keluarga Bani Kholil baik itu masalah agama, sosial dan politik, sehingga bisa di lihat pemelukada di Madura khususnya di Bangkalan, peran Bani Kholil dalam kiprah politiknya sangat dominan dalam menentukan arah politik di masyarakat, mulai dari zaman reformasi, orde baru, sampai sekarang.³

Aspek politik kepemimpinan kiai perlu diperhatikan karena ia mengungkap pola patronase dalam hubungannya dengan masyarakat, dan bagaimana kekuasaannya secara jelas terlihat sentralitas. Otoritas dan kekuasaan kiai dalam masyarakat menimbulkan asumsi bahwa pengaruh kiai tidak terbatas hanya pada hubungan sosial saja, tetapi juga dapat diterapkan dalam bidang politik. Asumsi ini dibuktikan dengan fakta bahwa selama pemelukada di Kabupaten Bangkalan, kiai selalu berada di posisi terdepan, baik di eksekutif

³ Imam Bukhori, *Wawancara*, Bangkalan 15 Desember 2015.

maupun legislatif setidaknya untuk 10 tahun terakhir. RKH. Fuad Amin Imron terpilih sebagai Bupati selama dua periode, lalu dilanjutkan oleh anaknya Ra Momon, tak hanya itu saja, lawan politik RA Fuad juga masih kerabat dekatnya sendiri yang juga dipanggil *lora* yaitu Ra Imam keponakannya sendiri.

Fakta sejarah ini pun menegaskan bahwa peran dan kharisma trah kiai di Kabupaten Bangkalan masih sangat dominan dalam kancah politik, peran trah kiai menjadi sangat vital dalam menentukan arah politik di Kabupaten Bangkalan bahkan trah kiai menjadi kiblat dalam struktur pemerintahan di Kabupaten Bangkalan.

C. Dampak Positif dan Negatif Trah Kiai Pasca Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bangkalan 2003-2013.

Pengaruh Kiai dalam wilayah politik tidak sekuat dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Meskipun menjadi tokoh kharismatik, hanya sedikit pengikut yang merasa terdorong untuk mengikuti langkah politik kiai. Perbedaan antara kiai dan pengikutnya dalam hubungannya dengan perilaku politik akhirnya menjadi fenomena biasa, khususnya setelah berubahnya partai politik Islam. Namun demikian, peran kiai secara umum masih tetap penting karena kiai berada di garis depan dalam membimbing moralitas dan ortodoksi umat Islam.

Sejarah trah kiai yang ada di Kabupaten Bangkalan yang terjun dalam kontestasi politik tentu mempunyai dampak, baik secara sosial ataupun dalam sudut pandang agama. Dampak trah kiai yang naik ke panggung politik dan menguasai pemerintahan selama 10 tahun belakangan menimbulkan pro-kontra, ada yang melihatnya sebagai hal positif, karena dapat menjadi panutan secara moral dan norma agama, namun ada pula yang melihatnya secara negatif, sebab tempat para kiai tak semestinya dalam politik, namun dalam hal *ubudiyah* semata, sebagai mana yang diungkapkan oleh Nur Hakim, *lakonah lekonih kennenggannah kennengih* (pekerjaanya kerjakan dan tempatnya ditempati).⁴ Dalam pandangan masyarakat awam khususnya di Kabupaten Bangkalan kiai merupakan panutan untuk melakukan segala sesuatunya. Bagaimana jika kiai terjun kedalam kontestasi politik merupakan banyak praktek-praktek yang berjauhan dari sudut pandang sosok kiai yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kiai setelah menduduki kepala daerah juga tak lepas dari dampak positif maupun negatif bagi pandangan masyarakat Bangkalan. Berikut dampak positif-negatif trah kiai pasca pilkada di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2003-2013 sebagai berikut:

1. Konflik tahun 2003

⁴ Nur Hakim, S. Pd.I, *Wawancara*, Bangkalan, 17 Desember 2015

Awal mula terjadi konflik di picu dengan adanya laporan pertanggung jawaban (LPJ) yang di lakukan oleh bupati Ir. HM. Fatah yang di tolak oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) di Kabupaten Bangkalan, karena isu yang beredar HM. Fatah ingin mencalonkan kembali menjadi bupati di Kabupaten Bangkalan, oleh karena itu terjadilah demonstrasi antar berbagai golongan. Namun aksi itu ditandingi oleh demonstnan lainnya yang mendukung keputusan DPRD Kabupaten Bangkalan yang menginginkan proses pemilihan bupati dan wakil bupati tetap berlangsung. Pihak demonstnan ini umumnya merupakan pendukung RKH. Fuad Amin Imron (Ra Fuad), calon kuat yang memang didukung massa secara riil. Di sisi yang lain, di tubuh keluarga besar bani Kholil bermusyawarah untuk mengajukan calon bupati yang akan di usung oleh partai kebangkitan bangsa (PKB). Pada saat itu banyak kontroversi pendapat di kalangan masyarakat bahwa, kiai jangan terjun pada kontestasi politik pada saat itu, seorang kiai biar fokus pada urusan pesantren dan dakwah kepada masyarakat. Sedangkan yang setuju terhadap kiai terjun pada kontestasi politik berpandangan bahwa kiai bisa bergerak dalam urusan politik, kebangsaan dan bisa melakukan tranformasi di kalangan pemerintah.

a. Dampak positif trah kiai pasca Pilkada Tahun 2003

- ✓ Di pimpin oleh tokoh kiai yang mendalami ilmu agama
- ✓ Sosio-kultural yang baik kepada masyarakat

b. Dampak negatif trah kiai pasca pilkada tahun 2003

- ✓ Menurunnya pandangan masyarakat terhadap kharismatik sosok kiai.
- ✓ Pengambilan kebijakan yang sangat otoriter.
- ✓ Semakin massif dalam melancarkan tindakan-tindakan yang menuju pada korupsi.

2. Konflik tahun 2008

Pada tahun 2008 tidak ada konflik yang mencuat ke masyarakat umum utamanya masyarakat Bangkalan, karena pada saat itu kondisi Kabupaten Bangkalan sudah ada di bawah kekuasaan Ra Fuad selaku Bupati Bangkalan pada saat itu. Corak kepemimpinannya yang sangat otoriter menjadikan masyarakat dan bawahannya merasa takut untuk melakukan perlawanan, sehingga konflik yang terjadi bersifat laten. Jadi dampak pada tahun 2008 hampir sama dengan pada tahun 2003.

a. Dampak positif trah kiai pasca pilkada tahun 2008

- ✓ Pemimpin kiai sangat pas menjadi pemimpin untuk masyarakat di Kabupaten Bangkalan.
- ✓ Kondisi sosial-politik tetap terkendali di bawah kebijakan RKH. Fuad Amin Imron (Ra Fuad).

b. Dampak negatif trah kiai pasca pilkada tahun 2008

- ✓ Kebijakan yang sangat otoriter

- ✓ Semakin massif dalam melancarkan tindakan-tindakan yang menuju pada korupsi.

3. Konflik tahun 2013

Walaupun Ra Fuad tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai bupati pada tahun 2013 berdasarkan UU no. 24 tahun 2014, akan tetapi, pengaruh dari keluarga besar bani Kholil tetap masih sangat dominan dalam persoalan menentukan arah politik di Kabupaten Bangkalan. Hal itu sangat jelas pada pilkada tahun 2013, dimana putra dari Ra Fuad yang bernama Makmun Ibnu Fuad di putuskan untuk di calonkan dalam pilkada, menggantikan dirinya sebagai bupati di Kabupaten Bangkalan. Sedangkan konflik yang muncul berawal dari internal kepengurusan partai yang mengusungnya yakni Partai Persatuan Daerah (PPD) yang berganti nama menjadi Partai Persatuan Nasional (PPN), antara pengurus lama dengan pengurus baru (ketua dan sekretaris) H.M. Mukhlis Alkomi, S. Pd. sebagai ketua dan Ahmad Rois sebagai sekretaris dari Partai Persatuan Daerah kepengurusan yang lama, sedangkan dari pengurus baru Supardi sebagai ketua dan Husnan sebagai sekretaris dari Partai Persatuan Nasional, kedua pengurus partai tersebut saling mengaku menjadi pengurus dan saling menunjukkan SK. Akhirnya H.M. Mukhlis Alkomi S. Pd. dan Ahmad Rois merasa dirinya dirugikan, karena mereka tidak merasa mengusung calon K.H Imam Bukhori dan HR. Zainal Alim sehingga berujung pada mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya, dan PTUN memenangkan

mereka. Oleh karena itu, KPUD Bangkalan akhirnya mendiskualifikasi pasangan Cabup-Cawabup nomor urut satu yakni pasangan K.H Imam Bukhori dan Zainal Alim.

Didiskualifikasinya pasangan Cabup-Cawabup nomor urut satu K.H Imam Bukhori dan Zainal Alim membuat gejolak di kalangan bawah terutama kalangan santri dan kaum "*blater*". Gejolak santri dan kaum *blater* tersebut sampai pada pendudukan gedung KPUD Bangkalan selama hampir satu minggu. Konsekuensi dari keputusan KPUD tersebut otomatis pilkada Kabupaten Bangkalan hanya diikuti 2 pasangan calon. Setelah melalui proses pencoblosan dan ditetapkanlah pasangan calon Makmun Ibnu Fuad (Ra Momon) dan Ra Mundir Rofi'i, sebagai pemenang pilkada tahun 2013. Dampak yang ditimbulkan pada pilkada tahun 2013 ini menjadi langkah awal terbukanya kedok dari sistem politik Ra Fuad sebagai pemegang kebijakan selama ini, adapun dampak-dampaknya sebagai berikut:

- a. Dampak positif trah kiai pasca pilkada tahun 2013
 - ✓ Muh. Makmun Ibnu Fuad sebagai putra RKH. Fuad Amin Imron menjadi Bupati termuda di Indonesia, yakni berusia 26 tahun.
- b. Dampak negatif trah kiai pasca pilkada tahun 2013
 - ✓ Menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat, perpecahan yang terjadi antara Gelora mahasiswa peduli rakyat (GEMPAR), Gerakan masyarakat

peduli Ra Momon (GEMPUR), dan Gerakan peduli Ra Fuad (GAPURA).

Hal mengakibatkan demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Bangkalan.

- ✓ Mengurangi nilai positif kiai sebagai panutan masyarakat di Kabupaten Bangkalan.
- ✓ Timbulnya konflik di parlemen. Seperti konflik antara kubu pro dan kontran pemerintah Kabupaten Bangkalan diantaranya kubu fraksi PDIP dengan fraksi Partai Gerindra. Konflik ini di picu dengan pencabutan terpilihnya anggota Komisioner Informasi (KI) yakni Aliman Haris yang tidak di SK oleh Ra Momon sebagai Bupati karena berbeda pandangan politik.
- ✓ Terbuktinya melakukan tindakan KKN di Kabupaten Bangkalan. Hal ini dibuktikan dengan dengan jatuhnya vonis 8 tahun penjara terhadap RKH. Fuad Amin Imron dalam kasus suap gas alam Bangkalan yang merugikan sebesar Rp. 18,5 miliar rupiah.
- ✓ Menurunnya kharismatik salah satu kiai di Kabupaten Bangkalan yakni RKH. Fuad Amin Imron (RA. Fuad). Hal itu terbukti dengan ditangkapnya RA Fuad oleh KPK, KH. Imam Bukhori (RA Imam) melaksanakan nadzarnya (penyembelihan sapi) dan di bagi-bagikan kepada warga Bangkalan.⁵

⁵ <http://m.okezone.com/read/2014/12/02/340/1073785/fuad-amin-ditangkap-kpk-ra-imam-sembelih-sapi>. diakses (5 Februari 2016).

